

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korea Selatan merupakan salah satu negara inovatif di abad 21 yang sekarang ini dapat dikatakan sebagai pemimpin global dalam teknologi informasi dan komunikasi. Untuk berada di posisi ini Korea Selatan tidak memperolehnya secara instant, dimulai pada tahun 1961 Presiden Park Chung-Hee yang mendorong perkembangan ekonomi Korea Selatan. Park Chung-Hee berupaya untuk menggeser ekonomi Korea Selatan yang semula mengalami ketergantungan pasca perang pada impor teknologi dan pembangunan fasilitas industri oleh perusahaan asing menjadi fokus pada industri padat karya yang tumbuh di dalam negeri. Tindakan Park Chung-Hee secara tidak langsung memunculkan kelompok industri besar yang disebut chaebol, yang dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau keluarga Korea Selatan seperti LG Electronics, Lotte, Samsung Electronics, dan SK Hynix dan mendorongnya menuju industri baru seperti industri petrokimia, industri manufaktur mobil dan pembuatan kapal, serta industri elektronik. Pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an Pemerintah Korea Selatan dan para pelaku industri melakukan kolaborasi dan investasi jangka panjang, dibuktikan dengan Pemerintah Korea Selatan yang beralih ke industri teknologi tinggi seperti desain dan manufaktur semikonduktor dengan mendirikan KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) pada tahun 1971 yang hingga saat ini tetap menjadi universitas riset nasional terkemuka milik Korea Selatan (Dayton, 2020).

Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh di Asia. Membahas hubungan kedua negara ini menjadi sangat menarik, Korea dan Jepang telah berbagi sejarah rumit sejak sebelum zaman penjajahan Jepang di Korea, pecahnya perang di Semenanjung Korea, hingga hubungan yang terjalin sampai saat ini. Sejak abad ke-17 penduduk Korea telah berjuang mati-matian melawan serangan Jepang yang berulang kali mencoba menginvasi semenanjung Korea. Hingga pada 8 Oktober 1895, Jepang mengirimkan sekelompok pembunuh untuk membunuh Permaisuri Myeongseong yaitu permaisuri terakhir Korea, di Istana Gyeongbokgung, Seoul dan membakar habis jasad dari Permaisuri Myeongseong. Kematian dari

Permaisuri Myeongseong merubah sejarah Korea menjadi tragis beberapa diantaranya memicu Revolusi Petani Donghak, Perang Tiongkok-Jepang Pertama, Perang Rusia-Jepang, dan penjajahan Jepang di Korea pada 1910 (Historychannel.com). Tahun 1930 merupakan awal dari pergerakan Jepang dalam peperangan, Jepang memaksa orang-orang untuk bekerja di pabrik, tambang dan juga sebagai tentara. Kekuatan militer Jepang yang saat itu sedang berada di puncaknya membuat Jepang mampu menjajah banyak negara, dengan jumlah militernya yang banyak dan berada di luar Jepang membuat pemerintah Jepang mengirim puluhan ribu wanita yang kebanyakan dari mereka adalah orang Korea ke rumah militer untuk melayani tentara Jepang sebagai "wanita penghibur". Untuk mengembalikan hubungan antara Jepang-Korea pasca penjajahan Jepang di Korea, dibutuhkan waktu 20 tahun ketika Presiden Korea Selatan, Park Chung-Hee setuju untuk menormalkan hubungan dengan negara itu dengan imbalan ratusan juta dolar dalam bentuk pinjaman dan hibah. Jepang berpendapat bahwa perjanjian di tahun 1965 tersebut akan memulihkan hubungan diplomatik antara Korea-Jepang dan bersedia menyediakan lebih dari \$ 800 juta (£ 620 juta) dana bantuan untuk menyelesaikan masalah ini (News, 2019).

Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang tidaklah selalu baik-baik saja, permasalahan mengenai "wanita penghibur" kembali muncul di tahun 2018, ketika pengadilan tinggi Korea Selatan memerintahkan perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada Korea atas pemberlakuan kerja paksa. 1 Juli 2019 Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan baru terhadap Korea Selatan, dimana Jepang akan memperketat kontrol ekspor atas tiga bahan baku elektronik. Keputusan Pemerintah Jepang untuk memperketat ketiga bahan baku elektronik yaitu poliamida berfluorinasi, fotoreisis, dan hidrogen fluorida yang merupakan bahan-bahan penting untuk memproduksi semikonduktor perangkat elektronik di Korea ke Korea Selatan. Hingga Jepang yang juga mengambil tindakan untuk menghapus Korea Selatan dari "white list" mitra dagang Jepang yang disetujui oleh kabinet Jepang pada 28 Agustus 2019. Tindakan Jepang menghapus Korea Selatan dari "white list" mitra dagangnya semakin meningkatkan perselisihan diplomatik diantara kedua negara tetangga di kawasan Asia Timur (SUGIHARA, 2019).

Alasan dibalik tindakan Korea Selatan tersebut ternyata disebabkan oleh kebijakan Jepang untuk memperketat kontrol tiga bahan baku elektronik terhadap Korea Selatan pada 1 Juli 2019. Sedangkan Jepang yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang mengharuskan Jepang membayar ratusan ribu dolar AS sebagai kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja untuk Nippon Steel Jepang selama Perang Dunia II terkait dengan penyelesaian masalah "wanita penghibur" atau yang biasa disebut *Jugun Ianfu* mengeluarkan kebijakan 1 Juli 2019 untuk memperketat kontrol tiga bahan baku elektronik ke Korea Selatan (Marsyaf, 2019).

Mengingat bagaimana hubungan perdagangan antara Korea dan Jepang sudah lama terjalin dan terus mengalami peningkatan sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1965, tentunya permasalahan dalam perdagangan ini dapat dihindarkan. Data statistik perdagangan antara Korea Selatan-Jepang menunjukkan bahwa Jepang adalah sumber utama kedua setelah Amerika Serikat untuk ekspor dan impor Korea. Sedangkan bagi Jepang, Korea adalah pasar terbesar keempat untuk ekspor Jepang setelah Amerika Serikat, Taiwan, dan Cina, dan negara ketiga untuk impor setelah Amerika Serikat dan China. Korea Selatan yang dikenal dengan negara produsen chip memori terbesar di dunia tentunya akan membutuhkan Jepang yang mempunyai peran sebagai pemasok terbesar material penting dalam produksi chip untuk dapat melahirkan beberapa produk teknologi seperti smartphone, televisi dan komputer. Korea Selatan dan Jepang dikenal dengan kecanggihannya produk teknologinya ini merupakan negara yang bertetangga dan negara sekutu utama Amerika Serikat di Asia Timur. Jauh sebelum itu terjadi Jepang dan Korea telah menjadi mitra dagang utama, dan baru pada 1998 diadakan diskusi tentang *Free Trade Area (FTA)* antara kedua negara dimulai (Warwick J. McKibbin, 2007).

September 2000 Presiden Korea Kim Dae Jung mengunjungi Jepang dan mengusulkan forum bisnis antara Korea-Jepang sehingga kedua negara ini dapat saling bertukar pandangan dengan sektor swasta, dan mengusulkan negosiasi untuk perjanjian investasi bilateral dan memperluas kerja sama di sektor informasi dan teknologi (IT). Tahun 2001 Korea Selatan dan Jepang sepakat membentuk Forum Bisnis Korea Selatan-Jepang. Diskusi untuk membentuk FTA antara Korea Selatan-Jepang semakin meningkat dari yang semula non-pemerintah berubah level menjadi semi-pemerintah, Maret 2002 menjadi puncak pertemuan antara Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung dengan Perdana Menteri Jepang Koizumi Junichiro yang menyepakati adanya FTA (Warwick J. McKibbin, 2007).

Pembatalan kerjasama intelijen dengan Jepang dibawah Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer yang dilakukan Korea Selatan terjadi setelah kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk memperketat ekspor tiga bahan baku elektronik kepada Korea Selatan. Kebijakan pemerintah Jepang yang dikeluarkan pada hari Senin 1 Juli 2019 ini membuat warga Korea Selatan marah dan mulai untuk menolak barang-barang Jepang dan memulai kampanye “No Selling No Buying Japanese Product” melalui aplikasi seluler dan situs web. Pada 5 Juli 2019 Kim Sungmin salah satu pemilik dari supermarket di Seoul bersama anggota asosiasinya yang berjumlah 100.000 orang berkumpul untuk menyuarakan “No Selling No Buying Japanese Product” (CNA, 2019). Fenomena ini bukan semata-mata sebuah permainan dagang, hal ini mereka lakukan sebagai suatu tindakan protes terhadap kebijakan Jepang yang telah melanggar kesepakatan perdagangan yang telah disepakati bersama. Selain melakukan penolakan terhadap produk Jepang yang dilakukan warganya, 11 September 2019 Pemerintah Korea Selatan membawa kasus ini ke WTO (World Trade Organization) dan pada tanggal 12 September 2019 secara resmi menghapus Jepang dari “daftar putih” mitra dagangnya. Tidak cukup sampai disitu, pada 15 November 2019 Korea Selatan juga mengumumkan keputusan untuk membatalkan kerjasama intelejen (The General Security of Military Information Agreement) dengan Jepang. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan ini diambil setelah sebelumnya Jepang menghapus Korea Selatan dari “white list” pada 28 Agustus (TIMES, 2019).

## **B. Rumusah Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Respon Pemerintah Korea Selatan Atas Kontrol yang Dilakukan Pemerintah Jepang untuk Bahan Baku Elektronik Pada Tahun 2019?

## C. Kerangka Pemikiran

### Kebijakan Luar Negeri K.J. Holsti

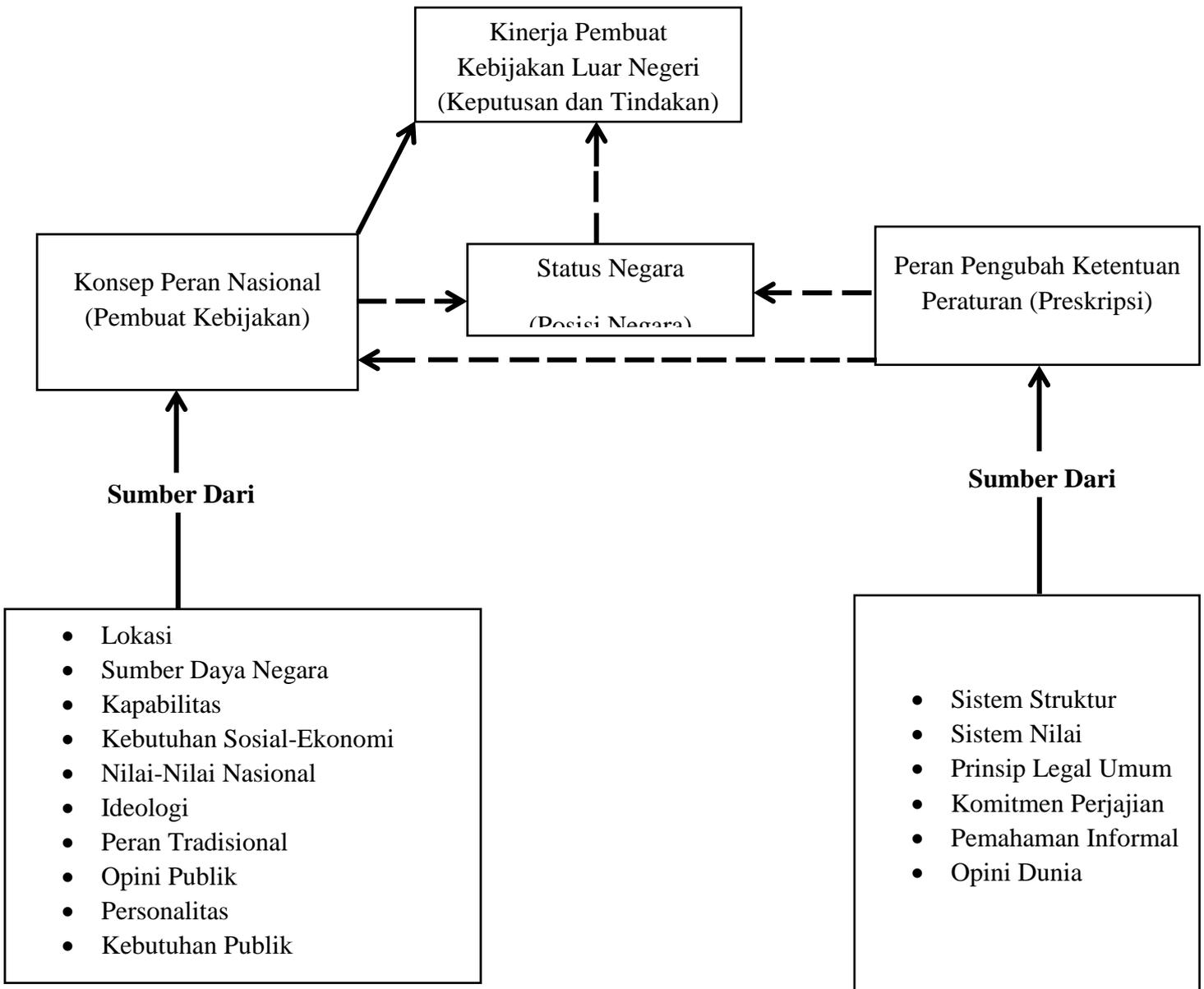
Kebijakan Luar Negeri atau *foreign policy* memang tidak bisa lepas dari bidang Ilmu Hubungan Internasional. K.J. Holsti berpendapat bahwa ketika negara melakukan interaksi akan melahirkan politik internasional, sedangkan suatu negara melakukan kebijakan terhadap negara lain dalam lingkungan internasional maka akan melahirkan politik luar negeri yang didalamnya mengandung berbagai upaya untuk memperoleh keuntungan nasional negaranya (Holsti, 1992). K.J. Holsti berpendapat bahwa ada tiga kriteria dalam mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

- Nilai (*values*), merupakan tujuan utama dari para pembuat keputusan.
- Jangka waktu, dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktu untuk mencapai suatu tujuan yang telah sebelumnya ditetapkan yaitu tujuan jangka pendek (*short-term*), tujuan jangka menengah (*middleterm*), dan tujuan jangka panjang (*long-term*).
- Tipe, berupa bentuk tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Starr, 1988).

Kebijakan. Kebijakan Luar Negeri sangat erat hubungannya dengan orientasi negara. Menurut K.J. Holsti orientasi negara merupakan sebuah kebijakan negara atau strategi negara untuk memunculkan Konsep Peran Nasional Pembuat Kebijakan. K.J. Holsti mengungkapkan bahwa ada empat (4) konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara yaitu :

- *National Role Conception*, yaitu faktor internal yang ada di dalam suatu negara.
- *Role Prescriptions*, yaitu faktor pengubah (*alter*) seperti opini publik, posisi tertentu dari institusi yang ada.
- *Role Perfomance*, yaitu sikap, perilaku, tindakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan.
- *Position*, yaitu kedudukan maupun posisi suatu negara dalam dunia internasional (Putranto, 2019).

Skema Role Theory and Foreign Policy Analysis K.J. Holsti (Dolkemeyer, 2020).



Dalam skema yang dirumuskan oleh K.J. Holsti menunjukkan identifikasi lebih jauh mengenai Peran Pengubah Ketentuan Peraturan (Preskripsi), Konsep Peran Nasional (Pembuat Kebijakan) dan Status Negara (Posisi Negara) untuk menjelaskan repon yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan. Keterlibatan Korea Selatan dalam kerjasama internasional memungkinkan pemahaman yang lebih tentang situasi dan kondisi Korea Selatan dengan mempertimbangkan berbagai sumber faktor untuk Peran Pengubah Ketentuan Peraturan (Preskripsi), Konsep Peran Nasional (Pembuat Kebijakan) dan Status Negara (Posisi Negara). Kebijakan Luar Negeri hakekatnya adalah teknik-teknik maupun strategi-strategi yang digunakan oleh suatu negara sebagai sarana mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasarkan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, K.J. Holsti membedakannya menjadi :

- *Diplomacy*, dilakukan oleh suatu negara melalui proses negosiasi dimana pemerintah akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan, ancaman, janji, dan kesepakatan-kesepakatan.
- *Propaganda*, dilakukan oleh suatu negara dengan berusaha untuk mempengaruhi perilaku, opini publik negara lain, kelompok tertentu dengan harapan akan mempengaruhi agar bertindak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah negara pelaku propaganda tersebut.
- *Economy*, dilakukan oleh suatu negara melalui manipulasi transaksi ekonomi internasional berupa imbalan (rewards) bahkan paksaan (coercion) demi mencapai tujuan-tujuan nasional negaranya.
- *Military*, dilakukan oleh suatu negara dengan dukungan sektor militer dan menggunakan ancaman mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lainnya (Holsti, Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis, 1990, hal. 130-192).

Merasa posisinya sebagai negara produsen chip terbesar di dunia terancam akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang, membuat Korea Selatan segera mengambil langkah agar kepentingan nasional Korea Selatan tetap terlindungi melalui tindakan-tindakan maupun strategi-strategi yang dirancang berdasarkan kondisi internal maupun faktor pengubah (alter) seperti opini publik, posisi tertentu dari institusi yang

ada. Dengan melaporkan Jepang ke WTO (World Trade Organization), penghapusan Jepang dari “white list” mitra dagang dan pembatalan kerjasama saling berbagi informasi intelejen dengan Jepang pun digunakan Korea Selatan sebagai strategi untuk mengancam balik pihak Jepang.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan gabungan hasil dari Peran Pengubah Ketentuan Peraturan (Preskripsi) dan Konsep Peran Nasional (Pembuat Kebijakan) dalam suatu negara sehingga dapat mempengaruhi para pengambil keputusan (*decision maker*) untuk membuat kebijakan luar negeri dengan tetap memperhatikan posisi suatu negara dalam hubungan internasional (ADLI, 2018). Keseriusan Korea Selatan untuk mewujudkan keinginannya membuat Jepang untuk membayar kerugian selama masa kolonialisme dan perbaikan hubungan Jepang-Korea Selatan dapat dilihat dari kegiatan Politik Luar Negeri Korea Selatan yang intens dalam melakukan usaha-usaha untuk menjalin hubungan Jepang-Korea Selatan menjadi membaik dalam hal keamanan, politik, ekonomi maupun pendidikan. Keinginan tersebut diwujudkan oleh Korea Selatan dengan melakukan berbagai kerjasama-kerjasama dengan Jepang.

Namun ketika pada Senin 1 Juli 2019 Jepang mengumumkan kebijakan tentang pemperketat kontrol terhadap bahan baku elektronik kepada Korea Selatan, kebijakan Jepang ini membuat pihak Korea Selatan marah karena merasa dirugikan dan kepentingan nasionalnya terancam. Sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat Korea Selatan mulai menolak produk Jepang dan menyuarakan “No Selling No Buying Japanese Product” dan “No Abe”. Tindakan penolakan produk Jepang memang secara resmi tidak dideklarasikan oleh pemerintah Korea Selatan namun seruan “No Selling No Buying Japanese Product” dan “No Abe” menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak masyarakat Korea Selatan yang berdemo untuk menolak produk Jepang pun lama kelamaan membuat pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan untuk mengeluarkan Jepang dari “white list” mitra dagangnya serta memutus perjanjian intelejen (The General Security of Military Information Agreement) antara Korea Selatan-Jepang. Hong Nam-ki selaku Menteri Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa, "Kami akan terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatis, tetapi kami juga akan menghapus Jepang dari “white list” mitra dagang Korea Selatan dan melalui proses untuk

memperkuat kontrol ekspor kami." Hong Nam-Ki menganggap keputusan pemerintah Jepang secara fundamental menghancurkan hubungan kepercayaan dan kerja sama yang dibangun kedua negara (Web, 2019).

Dari Skema Kebijakan Luar Negeri milik K.J. Holsti dapat menjelaskan bagaimana faktor-faktor Peran Pengubah Ketentuan Peraturan (Preskripsi), Konsep Peran Nasional (Pembuat Kebijakan) dan Status Negara (Posisi Negara) pemerintah Korea Selatan mendasari hubungan internasional diantara Korea Selatan dengan Jepang. Kondisi dalam negeri Korea Selatan yang pada saat itu mayoritas penduduk Korea Selatan menolak segala produk dari Jepang, merupakan cerminan dari bentuk dorongan agar Pemerintah Korea Selatan sebagai *decision maker* Selatan untuk bertindak dengan tujuan mempengaruhi kebijakan politik negeri Korea Selatan terhadap Jepang. *Decision Maker* dengan faktor-faktor pendorong kebijakan dapat dipastikan memiliki "*simbiosis mutualisme*" yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Korea Selatan dapat dipastikan membutuhkan kebijakan-kebijakan untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional Korea Selatan.

Moon Jae-In sebagai Presiden Korea Selatan yang saat ini menjabat bertekad untuk membawa perekonomian Korea Selatan untuk tidak tertinggal jauh bahkan setara dengan Jepang. Dalam menanggapi perselisihan ini Moon Jae-In melakukan sumpah pada tanggal 02 Agustus 2019 bahwa Korea Selatan tidak akan di kalah oleh Jepang lagi dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jepang merupakan tindakan egois (Utomo, 2019). Melihat kondisi ekonomi Korea Selatan yang terancam dengan kebijakan Jepang untuk memperketat kontrol bahan baku elektronik kepada Korea Selatan juga menambah tekanan pemerintah Korea Selatan untuk segera mengambil langkah agar kepentingan nasional Korea Selatan tetap terlindungi. Selain melaporkan tindakan Jepang ke WTO (World Trade Organization) dan penghapusan Jepang dari "white list" mitra dagang Korea Selatan, sektor militer Korea Selatan yang saat itu bekerja sama dan saling berbagi informasi intelejen dengan Jepang pun digunakan Korea Selatan untuk mengancam balik pihak Jepang dengan membatalkan serta menghentikan kegiatan berbagi informasi intelejen dengan Jepang. (Kiki Nindya Asih, 2019).

## **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan suatu bentuk perumusan jawaban sementara terhadap suatu fenomena yang ada sebagai acuan sementara dalam penyelidikan udalam mencari jawaban yang sebenarnya. Dalam hipotesa tidak selalu harus memuat jawaban mutlak dianggap benar atau yang harus dibenarkan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat mengasumsikan suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Korea Selatan melaporkan Jepang ke WTO(World Trade Organization), Membatalkan dan menghentikan kegiatan berbagi informasi militer dan intelejen dengan Jepang, serta Menghapus Jepang dari *white list* mitra dagangnya”**

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan ini, penulis menggunakan metode penelitian mengenai studi kasus diatas dengan pendekatan kualitatif. Dimana melalui pengambilan data-data penunjang diambil dari dari sejumlah buku, jurnal, website, dan data-data yang selanjutnya akan ditulis secara deskriptif. Data sekunder diambil dari situs resmi negara Korea Selatan maupun Jepang serta situs resmi literatur yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi Korea Selatan dan Jepang yang dibahas.

## **F. Tujuan Penulisan**

1. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Penelitian ini bertujuan menambah literasi mengenai hubungan perekonomian Korea Selatan dan Jepang
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah Korea Selatan atas kontrol yang dilakukan Jepang terhadap bahan baku elektronik di tahun 2019.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan ruang lingkup mengenai respon pemerintah Korea Selatan atas kontrol yang dilakukan Jepang terhadap bahan baku elektronik di tahun 2019. Dimulai dengan mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan hubungan kerjasama ekonomi diantara Korea Selatan dengan Jepang, hingga respon pemerintah Korea Selatan atas kontrol yang dilakukan Jepang terhadap bahan baku elektronik di tahun 2019.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan :

- BAB I :** Bab I berisikan pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Bab II akan dilakukan pemaparan Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang khususnya dibidang ekonomi dan Alasan Jepang mengeluarkan kebijakan pada tanggal 1 Juli 2019.
- BAB III :** Bab II akan membahas mengenai Respon Pemerintah Korea Selatan Atas Kontrol yang Dilakukan Pemerintah Jepang untuk Bahan Baku Elektronik Pada Tahun 2019 disertai dengan Analisis menggunakan konsep kebijakan luar negeri milik K.J Holsti.
- BAB IV :** Bab IV akan dipaparkan kesimpulan yang diambil dari penggabungan Bab 1, Bab 2 hingga Bab 3.